BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk pastilah memiliki naluri, salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Ikatan tersebut akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Suatu masyarakat mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari satu kesatuan lainnya. Dimana semua itu adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan yang terikat oleh rasa identitas yang sama.¹ Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Bagi mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya misalnya dikucilkan dari masyarakat atau sesuai dengan adat yang disepakati sebelumnya. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

¹Tolib Setiady, (*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*), Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 221.

Menurut Imam Sudiyat, bahwa :

“Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.”²

Dari adanya perbedaan-perbedaan itu maka berbeda pula adat-istiadat dalam hal perkawinannya.

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kamus (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.³

Perkawinan yang menjadi gerbang utama untuk memasuki kehidupan dilakukan dengan berbagai perbedaan cara, baik dalam segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu penyebutan istilah perkawinan di Desa Rantau Panjang adalah *Lahi Kawin*, dimana hal ini diperkuat dengan pernyataan menurut Mukhtar YS, menyatakan bahwa Perkawinan lari pada masyarakat di Desa Rantau Panjang disebut dengan *Lahi Kawin* dimaksudkan yaitu laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang hendak dinikahinya dibawa pergi karena sesuatu

²Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 33.

³Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia Palembang*, PT. Rambang Indonesia, 2006, hlm. 13.

alasan. Misalnya orang tua perempuan tidak setuju dengan laki-laki pasangan dari anak perempuannya. Dalam Islam sendiri *Lahi Kawin* (kawin lari) merupakan pendahuluan sebelum mengarah ke perkawinan yang sesungguhnya.⁴

Berdasarkan alasan di atas bisa diungkapkan bahwa secara tidak sadar mereka melakukan kawin lari (*lahi kawin*) yang merupakan suatu pelanggaran adat yang secara turun temurun dan mereka yang melakukan pelanggaran adat tersebut akan dikenakan sanksi. Sebagaimana seloko adat mengatakan “*Kalaulah ningga umah agak setapak, ninggal bendul lah selangkah, namun tanggo lah sejentang, tibo di papannyo bedetak*”. (Jika sudah satu langkah meninggalkan rumah, juga melewati pelataran rumah, hingga melewati tangga, maka pelanggaran adat telah dilakukan.) Denda bagi yang melakukan pelanggaran adat khususnya kawin lari di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah berupa satu ekor kambing jika melaksanakan kawin lari dalam desa dan satu ekor kerbau jika melakukan kawin lari luar desa.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki sadar kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan bahwa “adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan idehyntitas kepada bangsa yang bersangkutan.”⁵

⁴ Wawancara dengan Mukhtar Ys, selaku tokoh Adat Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tgl, 5 Septmber 2021.

⁵Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. 8, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm.13

Definisi tentang hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli tetapi semua pendapat tersebut berbeda-beda.

Ter Haar, mengemukakan bahwa:

Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali⁶.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hukum adat adalah:

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan keadilan, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat⁷.

Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah

“Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan dipihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab Undang-undang yang tertentu susunannya.”⁸

Berdasarkan definisi Van Vollenhoven ini dapat dilihat bahwa aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi, ini disebut Hukum Adat, sedangkan aturan tingkah laku yang tidak ada sanksinya, manakala tidak diikuti atau dilanggar, ini disebut adat atau kebiasaan saja. Karena dalam percakapan sehari-hari untuk hukum adat sering dipakai istilah “adat” saja, sedangkan untuk kebiasaan juga dipakai istilah “adat”, akan tetapi jika yang dimaksudkan itu adalah “adat” yang mempunyai sanksi manakala dilanggar, ini adalah Hukum Adat.

⁶Suriatman Mustafi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁷Chatarina Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 1 PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 5.

⁸Suriatman Mustafi Pide, *Op. Cit*, hlm, 15

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum adat berasal dari beberapa sumber dalam masyarakat, seperti:

1. Kebiasaan masyarakat setempat;
2. Kebudayaan tradisional masyarakat;
3. Kaidah kebudayaan asli Indonesia;
4. Pepatah adat;
5. Dokumen atau Naskah pada masa itu.⁹

Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Hukum adat mengatur tentang berbagai hal, salah satunya adalah mengatur tentang pelanggaran adat atau delik adat.

Menurut Ter Haar suatu delik itu “Sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang materil dan immateril milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat diperbaiki.”¹⁰

Masyarakat atau golongan menghendaki hukumnya ditaati, akan tetapi tidak semua orang mentaatinya, supaya hukum ditaati maka masyarakat membuat suatu sarana yang berfungsi sebagai penguat, yaitu disebut dengan sanksi formal yang datang dari negara dan sanksi informal yang datang dari masyarakat adat.

⁹*Ibid.*, hlm, 25.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 8.

Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain, begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarena perbedaan tata tertib adat maka seringkali berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan¹¹.

Perbedaan hukum adat yang berlaku di setiap tempat sering kali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan dan kedamaian. Oleh karenanya disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Pada umumnya kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan maka terjadilah kejadian

¹¹Hilman Hadikusama, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 12.

melarikan.¹² Kawin lari merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat , melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat pihak gadis.¹³ Umumnya yang melakukan kawin lari ini adalah anak-anak di bawah umur yang tidak mendapat ijin dari orang tua mereka.¹⁴

Pelaksanaan adat kawin lari di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ada dua macam, yaitu:

1. Adat kawin lari dalam dusun/dalam desa;
2. Adat kawin lari luar dusun/luar desa;

Hukum adat Desa Rantau Panjang sudah sangat jelas mengatur tata cara atau tahapan perkawinan adat berdasarkan adat masyarakat setempat, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. *Tegak Bertuik, Duduk Bertanggo*
Tegak Bertuik, Duduk Bertanggo, yaitu pihak laki-laki mengirim utusan kepihak perempuan ngantar cakap, runding melamar.
2. *Antar Tando/ Sarung Tando*
Antar Tando/ Sarung Tando yaitu proses pelamaran atau peminangan pihak perempuan dengan meletakkan cincin. Dimana seloko adat mengatakan “*cincin sebentuk tando bertunang, kain sehelai tando nak jadi dan ikat buat janji semayo.*”
3. *Kelompok Waris/ Rapat Waris*
Kelompok Waris/ Rapat Waris yaitu mengumpulkan *Ninik Mamak* dan semua waris dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.
4. *Rapat Negeri*
Rapat Negeri yaitu tanda waris naik ke *Tuo* dengan *Penghulu* yang mana maksudnya memberi tahu pemimpin adat dan pemimpin desa bahwa akan melaksanakan perkawinan.

¹²Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Cet. 1 Yogyakarta, 1989, hlm. 105.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet-6, (Bandung, Aditya Bakti, 2003), hlm. 36.

¹⁴ Wawancara dengan Iskandar A.G selaku tokoh masyarakat Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 23 Juli 2021.

5. *Antar Serah / Bertimbang Adat*

Antar Serah/Bertimbang Adat yaitu tahap dimana pihak laki-laki menyerahkan perundingan kepada pihak perempuan berupa antar hantaran (*belanjo*) yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

6. *Akad Nikah (Kerjo Syarak)*

Akad nikah (kerjo syarak), yaitu melakukan proses akad nikah yang dilakukan oleh syarak (imam).

7. *Terimo Mempelai Laki-laki*

Terimo Mempelai Laki-laki yaitu pihak waris laki-laki mengantarkan si laki-laki kerumah perempuan dan memberi tahu bahwa si laki-laki akan tinggal di kediaman orang tua perempuan.

8. *Tunjuk Ajar Tegur Sapo Untuk Keduo Mempelai*

Tunjuk Ajar Tegur Sapo untuk keduo mempelai adalah tahap dimana pemimpin adat memberikan ajaran kepada kedua mempelai dalam kehidupan berumah tangga.¹⁵

Hukum Adat Desa Rantau Panjang sudah dengan tegas melarang perbuatan kawin lari ini, namun tetap saja ada pemuda-pemudi desa yang melakukan kawin lari ini tiap tahunnya. Perbuatan kawin lari ini merupakan suatu pelanggaran terhadap adat yang dimana seloko adat *Undang Semendo Menyemendo Serto Perkawinan*, sebagaimana yang berbunyi *benci dengan tuo negeri tinggalkan kampung, benci dengan waris tinggalkan semendo* artinya benci dengan orang tua tinggalkan kampung, benci dengan keturunan atau waris tinggal kerabat, ini merupakan suatu perbuatan kesalahan bujang gadis yang dalam adat dikatakan perbuatan *Sumbang Salah* antara *Bujang dengan Gadis, Kok adat Ubi nyo Berisi, adat Tebu nyo bernas* artinya perbuatan *Sumbang salah bujang gadis* tersebut mengakibatkan si perempuan hamil.

¹⁵Wawancara dengan Iskandar A.G, selaku tokoh masyarakat desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 23 Juli 2021

Dalam hal lari kawin *bak kato adat, melompat parit mengambur koto*. yaitu lari jauh untuk kawin, sehingga *Induk Bapak, Tenganai, ninik mamak, dan Batin ditinggalkan*, ini dianggap *merusak adat* menyumbing Pesako.

Berdasarkan pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Rantau Panjang, kasus perkawinan *Lahi Kawin* pada bulan Mei Tahun 2018 sampai bulan Desember Tahun 2020 berjumlah 10 (sepuluh) Pasang yang melakukan pelanggaran adat yaitu kawin lari di Desa Rantau Panjang. Pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) pasangan, 2 (dua) pasangan dengan alasan tidak disetujui kedua orang tua dari masing-masing pasangan tersebut dan 1 (satu) pasangan karena belum cukup umur kedua calon mempelai. Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) pasangan, yaitu 4 (empat) pasangan karena tidak mendapat persetujuan dari pihak perempuan, dan 1 (satu) pasangan karena perempuannya belum cukup umur untuk menikah secara Undang-Undang. Tahun 2020 berjumlah 2 (dua) pasangan yaitu tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua pihak perempuan.¹⁶

Hal di atas di benarkan pula dengan Kepala Desa Rantau Panjang, bahwasannya ada 10 (sepuluh) pasang yang melakukan *lahi kawin* di Desa Rantau Panjang. Beliau juga menjelaskan pada dasarnya *lahi kawin* ini sering terjadi di lingkungan masyarakat adat Desa Rantau Panjang dikarenakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak direstui oleh kedua orang tuanya, besarnya biaya hantaran dan itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Akan tetapi kawin lari (*lahi kawin*) pada masyarakat Adat Desa

¹⁶ Wawancara Abdullah Sani, selaku tokoh masyarakat Kecamatan Tabir, tanggal 24 Juli 2021.

Rantau Panjang berbeda dengan praktik kawin lari yang terjadi di Lampung, Batak, Bali dan Bugis.¹⁷

Hukum adat Desa Rantau Panjang memberi sanksi adat kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran adat, besaran denda juga sudah ada ketentuan. Namun, pelanggaran adat kawin lari masih saja terjadi bagi kaum muda-mudi di desa Rantau Panjang. Kawin lari merupakan perbuatan yang melanggar adat, tetapi masih dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang Tabir Kab. Merangin.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut menjadikan sebuah karya ilmiah dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Kawin Lari pada Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
2. Apa sebab terjadinya kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

¹⁷ Wawancara dengan Jupri selaku Kepala Desa Rantau Panjang.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam pengetahuan tentang kawin lari pada masyarakat adat desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

b. Secara praktisi

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum.

D. Kerangka Konseptual

Guna untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka diberilah penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Kawin Lari

Kawin lari menurut adat desa Rantau Panjang yang disebut dengan *lahi kawin* yaitu laki-laki yang ingin menikahi perempuan membawanya pulang kerumah salah seorang “*meman*” (paman) dari pihak perempuan.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah Kesatuan masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam. Dan tidak seorang pun para anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.¹⁸

3. Adat dan Hukum Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi, “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat.

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat

¹⁸ Lihat Muhammad Zen, *Adat Perkawinan Uhang Bathin 19*, Rantau Panjang, 2020, hlm. 14.

itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.¹⁹

Berdasarkan beberapa istilah dari konsep-konsep judul tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah proses *lahi kawin* menurut Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski yang dikutip dalam buku Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.²⁰

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang

¹⁹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta. Bandung, 2008. hlm. 1.

²⁰Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm. 305

dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa :

“Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²¹

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

²¹Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya. Bandung. 1988. hlm. 80.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Elemen di atas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman

²²Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm. 8

sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

2. Tipe Penelitian

²³ La Patuju dan Sakticakra Salimin, “*Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 1 No. 1 Desember 2016, hlm. 105-106.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”²⁴ Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, yaitu penelitian tentang kawin lari pada masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menganalisis objek yang diteliti berkenaan dengan kawin lari pada masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan teknik penarikan sampel dengan metode penarikan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk study penelitian.²⁵ Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan yang melakukan kawin lari, yang berjumlah 20 (dua puluh) orang. Sedangkan yang dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Rantau Panjang
2. 2 (dua) orang tokoh adat
3. 5 (lima) orang Masyarakat Desa Rantau Panjang

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 134.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara Berencana (Berpatokan) yaitu “sebelum dilakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur”.²⁶

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari dokumen dan literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

2) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

²⁶*Ibid*, hlm. 96.

Analisis data yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, Landasan Teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab II. Tinjauan Pustaka Tentang Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan Adat dalam Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang dan Delik Adat. Bab yang menguraikan pengertian tentang pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, sistem perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara perkawinan.

Bab III. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pelaksanaan kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Serta penyebab terjadinya kawin lari pada Masyarakat Adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Bab IV. Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.